

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten induk yang telah dimekarkan beberapa kali. Pada tahun 1983, Kecamatan Jayapura Selatan, Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Abepura dimekarkan menjadi satu wilayah administrasi sendiri, yaitu Kotamadya Jayapura, yang akhirnya menjadi Kota Jayapura saat ini. Kemudian pada Tahun 2003, Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kecamatan Sarmi, Bonggo, Pantai Barat, Pantai Timur, Mamberamo Hilir dan Mamberamo Hulu menjadi satu Kabupaten Pemekaran, yakni Kabupaten Sarmi; wilayah Kecamatan Arso, Skanto, Waris, Senggi dan Web menjadi satu Kabupaten Pemekaran, yakni Kabupaten Keerom; dan Kabupaten induk Jayapura tetap Kabupaten Jayapura.

Melalui UU No. 26 tahun 2002 tentang pembentukan 14 kabupaten baru di Provinsi Papua, maka wilayah administratif Kabupaten Jayapura mengalami penyesuaian yang semula terdiri dari 24 Distrik berkurang menjadi 11 Distrik dan lima kelurahan serta 106 kampung. Kondisi ini berubah seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik Ebung Fau, Distrik Waibu, Distrik Namblong, Distrik Yapsi dan Distrik Airu di Kabupaten Jayapura di daerah ini bertambah menjadi 19 distrik Kemudian

pada tahun 2006 dilaksanakan lagi penambahan tiga distrik dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 2/2006 tentang pembentukan Distrik Ravenirara, Distrik Yokari, dan Gresi Selatan. Tahun 2017 Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik, 139 Kampung dan 5 Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Jayapura mencapai 17.516,6 km² dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi; Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Waibu, Doyobaru, Papua. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 10 tahun 2017, maka Kabupaten Jayapura telah melakukan penataan dan restrukturisasi kelembagaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Jayapura. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura seiring dengan perubahan paradigma berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana aspek desentralisasi

lebih ditekankan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri semakin mapan seiring dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jayapura. Restrukturisasi terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah telah membentuk Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terdiri: 7 Badan, 25 Dinas, 2 Sekretariat (yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), 19 Distrik, dan 139 Kampung serta 5 Kelurahan.

a. Badan

Lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidangnya, dengan fungsi a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Penyediaan pelayanan penunjang; c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- 2) Badan Kepegawaiandan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

- 3) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
- 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

b. Dinas

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi

a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Pendapatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4) Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 5) Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker dan Trans)
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)
- 7) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kependapil)
- 9) Dinas Pemadam Kebakaran (PMK)
- 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
- 13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PM dan PTSP
- 15) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- 16) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kebudpar)
- 17) Dinas Kelautan
- 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

c. Sekretaris

1) Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsi a) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Distrik dan Kampung/Kelurahan; c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

d. Distrik

Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebanyak 19 distrik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Distrik, dengan fungsi a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan; d) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik; f) Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan; g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kampung/Kelurahan.

e. Kelurahan/Kampung

Pemerintahan Kampung/Kelurahan di Kabupaten Jayapura sebanyak 139 Kampung serta 5 Kelurahan yang mempunyai tugas membantu Distrik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dengan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jumlah personil/aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 3.734 pegawai (status PNS dan

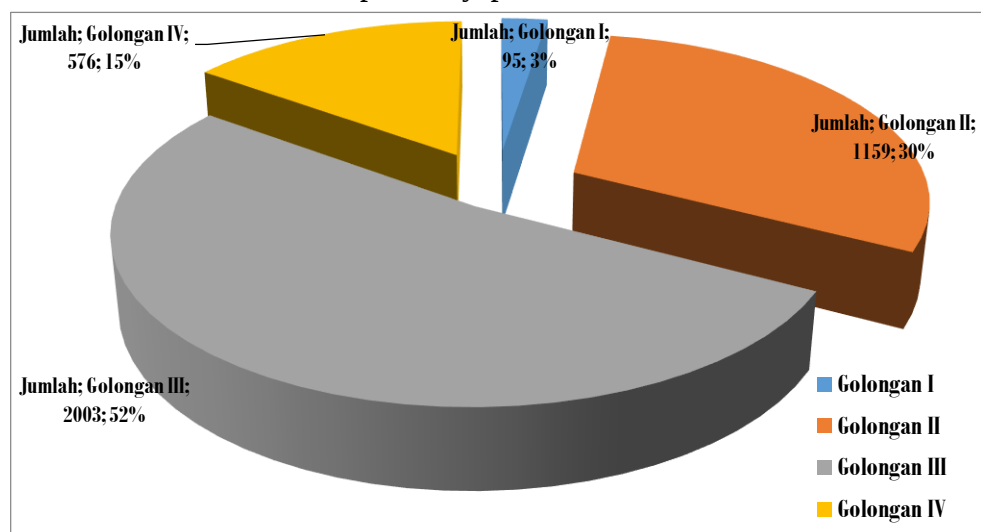
CPNS). Gambaran kondisi aparatur di Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Pejabat Struktural di Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tahun 2023

No	Pejabat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	0	1	1
2	Eselon II b	32	0	32
3	Eselon III a	40	11	51
4	Eselon III b	62	29	91
5	Eselon IV a	229	172	401
6	Eselon IV b	3	2	5
Jumlah		366	215	581

Sumber : BKPSDM Kab. Jayapura, 2023

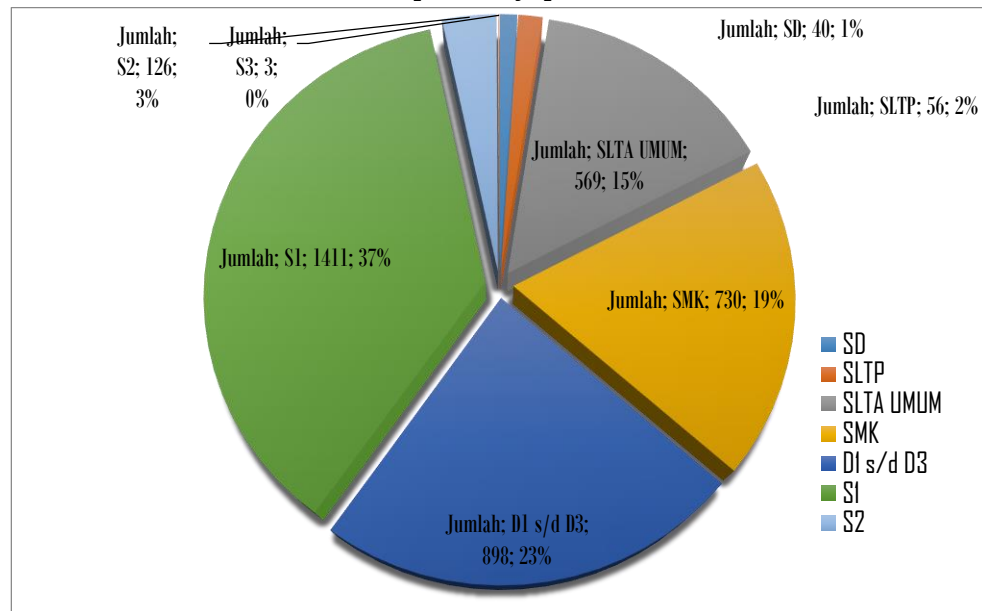
Gambar 4.1.
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022



Sumber : BKPSDM Kab. Jayapura, 2023

Jumlah pegawai di Kabupaten Jayapura terbanyak adalah terdiri dari Golongan III bila dibandingkan dengan jumlah pegawai Golongan II dan yang lainnya, hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

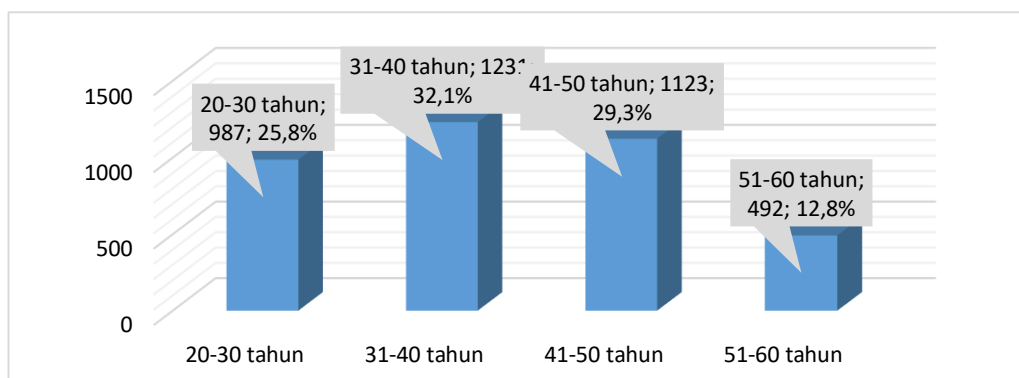
Gambar 4.2
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023



Sumber : BKPSDM Kab. Jayapura, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka pegawai di Pemerintah Kabupaten Jayapura lebih dominan memiliki latar belakang ijazah setara dengan S1 hingga ijazah S3 dibandingkan dengan yang memiliki ijazah setingkat SD hingga SLTA dengan perbandingan 43% untuk S1 s/d S3 sedangkan yang berpendidikan SD hingga SLTA sebesar 37% atau terpaut sekitar 6% masih lebih banyak S1 hingga S3, sisanya Diploma (D1 hingga D3) sebanyak 23%.

Gambar 4.3
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023



Berdasarkan usia, maka pegawai di Pemerintah Kabupaten Jayapura lebih dominan berumur antara 31-40 tahun sebanyak 1231 orang (32,1%) dan 41-50 tahun sebanyak 1123 orang (29,3%) sedangkan umur 20-30 tahun sebanyak 987 (25,8%) dan sedikit yang berumur 51-60 tahun sebanyak 492 orang (12,8%).

2. Gambaran Umum Responden

a. Umur

Tabel 4.2
Distribusi Umur Responden

No	Umur	n	%
1	21-30 tahun	1	2
2	31-40 tahun	6	12
3	41-50 tahun	31	62
4	51-60 tahun	12	24
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak berumur antara 41 – 50 tahun sebanyak 31 orang (62%) dan terendah berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang (2%).

b. Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Distribusi Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	n	%
1	Laki-Laki	28	56
2	Perempuan	22	44
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah laki-laki sebanyak 28 orang (56%) dan perempuan sebanyak 22 orang (44%).

c. Pendidikan

Tabel 4.4
Distribusi Pendidikan Responden

No	Pendidikan	n	%
1	D-III	2	4
2	S1	33	66
3	S2	14	28
4	S3	1	2
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan pendidikan S1 sebanyak 33 orang (66%) dan sedikit dengan pendidikan S3 sebanyak 1 orang (2%) dan D-III sebanyak 2 orang (4%).

d. Pendidikan

Tabel 4.5
Distribusi Jabatan Responden

No	Jabatan	n	%
1	Kepala Dinas	2	4
2	Kabag Keuangan	6	12
3	Kasubag Keuangan	42	84
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan jabatan Kasubag Keuangan sebanyak 42 orang (84%) dan sedikit menjabat kepala Dinas sebanyak 2 orang (4%).

e. Pangkat/Gol

Tabel 4.6
Distribusi Pangkat/Gol Responden

No	Pangkat/Gol	n	%
1	III/c	20	40
2	III/d	7	14
3	IV/a	16	32
4	IV/b	2	4
5	IV/c	4	8
6	IV/d	1	2
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan pangkat/Gol III/c sebanyak 20 orang (40%) dan sedikit dengan gol IV/d sebanyak 1 orang (2%).

f. Masa Kerja

Tabel 4.7
Distribusi Masa Kerja Responden

No	Masa Kerja	n	%
1	1-5 tahun	3	6
2	6-10 tahun	10	20
3	>10 tahun	37	74
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa masa kerja responden terbanyak > 10 tahun sebanyak 37 orang (74%) dan terendah dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 3 orang (6%).

3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden dari hasil kuesioner yang telah disebarakan meliputi penerapan SAP, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan SAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Analisis ini bersifat memberikan makna secara deskriptif dan kecenderungan yang muncul mengenai variabel penelitian sesuai dengan hasil dari data dilapangan. Dalam hal ini dasar interpretasi skor tanggapan responden pada setiap variabel penelitian adalah nilai rata-rata dan distribusi frekuensi jawaban responden atas setiap butir pertanyaan sehingga memberikan gambaran persepsi responden tentang masing-masing indikator.

Dasar interpretasi rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh Sugiyono (2017) dijelaskan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Dasar Interpretasi Skor Indikator

No	Nilai / Skor	Interpretasi
1	1 - 1,8	Sangat Kurang
2	>1,8 - 2,6	Kurang
3	>2,6 - 3,4	Cukup
4	>3,4 - 4,2	Baik
5	>4,2 - 5,0	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2017)

Hasil distribusi frekuensi dari 50 responden dalam penelitian ini dibahas secara deskriptif mengenai indikator/item variabel penelitian berdasarkan jawaban responden adalah sebagai berikut:

- a. Jawaban Responden tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tabel 4.9
Jawaban Responden Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Item	Frekuensi Jawaban												Rata-Rata
	1		2		3		4		5		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	0	0	3	6.0	44	20	40.0	40	16	14.5	50	100	3,64
2	0	0	1	2.0	19	38.0	28	56.0	2	4.0	50	100	3,62
3	0	0	1	2.0	19	38.0	29	58.0	1	2.0	50	100	3,60
4	0	0	4	8.0	5	10.0	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
5	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
6	0	0	3	6.0	20	40.0	19	38.0	8	16.0	50	100	3,64
7	0	0	1	2.0	19	38.0	28	56.0	2	4.0	50	100	3,62
8	0	0	4	8.0	5	10.0	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
9	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
10	0	0	4	8.0	5	10.0	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
11	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
Rata - Rata													3.82

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9, di atas menunjukan nilai rata-rata untuk 11 indikator dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berkisar dari 3,6 sampai dengan 4, 12. Indikator dengan nilai terendah sebesar 3,6 adalah indikator 3 yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai rata-rata tertinggi adalah 4,12 yaitu indikator ke 5 yaitu bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Indikator 9, yaitu metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama serta indikator 11 yaitu laporan keuangan di dinas ini menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nilai rata – rata variabel penerapan sistem akuntansi pemerintahan adalah 3,82 nilai ini berada pada kategori baik. Hal ini artinya responden memberikan pernyataan baik terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan Kabupaten Jayapura yang ada saat ini.

b. Jawaban Responden tentang Sitem Pengendalian Internal

Tabel 4.10
Jawaban Responden Tentang Sitem Pengendalian Internal

Item	Frekuensi Jawaban												Rata-Rata
	1		2		3		4		5		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
2	0	0	4	8	31	62.0	10	20.0	5	10.0	50	100	3,32
3	0	0	1	2	19	38.0	29	58.0	1	2.0	50	100	3,60
4	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
5	0	0	4	8	31	62.0	10	20.0	5	10.0	50	100	3,32
6	0	0	1	2	19	38.0	29	58.0	1	2.0	50	100	3,60
7	0	0	4	8	5	10.0	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
8	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
9	0	0	11	22	23	46.0	15	30.0	1	2.0	50	100	3,12
10	0	0	4	8	31	62.0	10	20.0	5	10.0	50	100	3,32
11	0	0	1	2	19	38.0	29	58.0	1	2.0	50	100	3,60
12	0	0	4	8	5	10.0	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
13	0	0	0	0	13	26.0	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
14	0	0	11	22	23	46.0	15	30.0	1	2.0	50	100	3,12
Rata - Rata													3,65

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.10, di atas menunjukkan nilai rata-rata untuk 14 indikator dari variabel sistem pengendalian internal berkisar dari 3,12 sampai dengan 4,12. Indikator dengan nilai terendah sebesar 3,12 adalah indikator 4 yaitu pada dinas ini dibuat kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan pengendalian fisik aset dan indikator 12 yaitu pada dinas ini menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Nilai rata-rata tertinggi adalah 4,12 yaitu indikator ke 1 yaitu lingkungan pengendali diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, indikator 4 yaitu lingkungan pengendali diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, indikator 8 yaitu penilaian risiko melalui analisis risiko serta indikator 13 yaitu dilakukan pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak

eksternal melalui pemantauan berkelanjutan. Nilai rata – rata variabel sistem pengendalian internal adalah 3,65 nilai ini berada pada kategori baik. Hal ini artinya responden memberikan pernyataan baik terhadap variabel sistem pengendalian internal yang ada saat ini.

c. Jawaban Responden tentang Pemanfaatan SAP

Tabel 4.11
Jawaban Responden Tentang Pemanfaatan SAP

Item	Frekuensi Jawaban												Rata-Rata
	1		2		3		4		5		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	0	0	0	0	13	26.0	18	36	19	38	50	100	4,12
2	0	0	3	6	20	40.0	19	38	8	16	50	100	3,64
3	0	0	1	2	19	38.0	28	56	2	4	50	100	3,62
4	0	0	4	8	5	10.0	35	70	6	12	50	100	3,86
5	0	0	3	6	20	40.0	19	38	8	16	50	100	3,64
6	0	0	1	2	19	38.0	28	56	2	4	50	100	3,62
7	0	0	1	2	19	38.0	28	56	2	4	50	100	3,62
Rata - Rata													3,73

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.11, di atas menunjukkan nilai rata-rata untuk 7 indikator dari variabel pemanfaatan SAP berkisar dari 3,62 sampai dengan 4,12. Indikator dengan nilai terendah sebesar 3,6 adalah indikator 3 yaitu laporan keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat bekerja di instansi dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur, indikator 6 yaitu ditempat bekerja di instansi telah melaksanakan pendataan terhadap komputer yang telah usang tepat pada waktunya serta indikator 7 yaitu sebagai pengelola keuangan telah memanfaatkan jaringan internet diunit instansi sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan. Nilai rata-rata tertinggi adalah 4,12 yaitu indikator ke 1 yaitu pengelola keuangan memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas. Nilai

rata – rata variabel pemanfaatan SAP adalah 3,73 nilai ini berada pada kategori baik. Hal ini artinya responden memberikan pernyataan baik terhadap variabel pemanfaatn SAP yang ada saat ini.

d. Jawaban Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.12
Jawaban Responden Tentang Kapasitas Individu

Item	Frekuensi Jawaban												Rata-Rata
	1		2		3		4		5		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	0	0	0	0	13	26	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
2	0	0	3	6	20	40	19	38.0	8	16.0	50	100	3,64
3	0	0	1	2	19	38	28	56.0	2	4.0	50	100	3,62
4	0	0	4	8	5	10	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
5	0	0	0	0	13	26	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
6	0	0	1	2	19	38	28	56.0	2	4.0	50	100	3,62
7	0	0	4	8	5	10	35	70.0	6	12.0	50	100	3,86
8	0	0	0	0	13	26	18	36.0	19	38.0	50	100	4,12
9	0	0	1	2	19	38	28	56.0	2	4.0	50	100	3,62
10	0	0	3	6	20	40	18	36.0	9	18.0	50	100	3,66
Rata - Rata													3,82

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.12, di atas menunjukan nilai rata-rata untuk 10 indikator dari variabel kualitas penyajian laporan keuangan berkisar dari 3,62 sampai dengan 4,12. Indikator dengan nilai terendah sebesar 3,62 adalah indikator 3 yaitu pada dinas ini laporan keuangan yang disajikan tepat waktu, indikator 6 yaitu laporan keuangan di dinas ini dapatdiverifikasi serta indikator 9 yaitu dinas ini informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Nilai rata-rata tertinggi adalah 4,12 yaitu indikator ke 1 yaitu laporan keuangan yang disajikan memiliki umpan balik, indikator 5 yaitu laporan keuangan disajikan dengan jujur serta indikator 8 yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan melalui

konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Nilai rata – rata variabel kualitas penyajian laporan keuangan adalah 3,82 nilai ini berada pada kategori baik. Hal ini artinya responden memberikan pernyataan baik terhadap variabel kualitas penyajian laporan keuangan yang ada saat ini.

4. Analisis Hasil Penelitian

1.3. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara indeks korelasi *Product Moment Person* dengan signifikan 5%. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka *instrument* dinyatakan valid. Sebaliknya jika hasil korelasi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka *instrument* dinyatakan tidak valid. Hasil uji terangkum pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X1)	1	0,465	0,279	Valid
	2	0,583	0,279	Valid
	3	0,559	0,279	Valid
	4	0,782	0,279	Valid
	5	0,832	0,279	Valid
	6	0,465	0,279	Valid
	7	0,583	0,279	Valid
	8	0,782	0,279	Valid
	9	0,832	0,279	Valid
	10	0,782	0,279	Valid
	11	0,832	0,279	Valid
	1	0,843	0,279	Valid
	2	0,425	0,279	Valid

Sistem Pengendalian Internal (X2)	3	0,606	0,279	Valid
	4	0,843	0,279	Valid
	5	0,425	0,279	Valid
	6	0,606	0,279	Valid
	7	0,675	0,279	Valid
	8	0,843	0,279	Valid
	9	0,113	0,279	Valid
	10	0,425	0,279	Valid
	11	0,606	0,279	Valid
	12	0,675	0,279	Valid
	13	0,843	0,279	Valid
	14	0,313	0,279	Valid
Pemanfaatan SAP (X3)	1	0,672	0,279	Valid
	2	0,466	0,279	Valid
	3	0,615	0,279	Valid
	4	0,610	0,279	Valid
	5	0,466	0,279	Valid
	6	0,615	0,279	Valid
	7	0,615	0,279	Valid
Kualitas penyajian laporan keuangan (Y)	1	0,842	0,279	Valid
	2	0,450	0,279	Valid
	3	0,613	0,279	Valid
	4	0,722	0,279	Valid
	5	0,842	0,279	Valid
	6	0,613	0,279	Valid
	7	0,722	0,279	Valid
	8	0,842	0,279	Valid
	9	0,613	0,279	Valid
	10	0,486	0,279	Valid

Sumber: Hasil output SPSS 24

Hasil pengujian validitas data di atas dapat disimpulkan valid, karena tingkat probabilitasnya atau tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% ($r_{hitung} > r_{tabel} 0,187$).

b. Uji Realibilitas

Menurut (Arikunto, 2017), realibilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel. Selain itu realibilitas juga digunakan untuk

menguji keakuratan dari data kuesioner karena skor seseorang mungkin berubah antara dua waktu pengukuran.

Selanjutnya untuk mengetahui suatu alat ukur itu realibilitas dapat diuji dengan menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2017). Apabila variabel yang diteliti mempunyai *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,7$, maka variabel tersebut dinyatakan *reliable* sebaliknya *Cronbach's Alpha* (α) $< 0,7$, maka variabel tersebut dinyatakan tidak *reliable*.

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X1)	0,917	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,887	0,70	Reliabel
Pemanfaatan SAP (X3)	0,824	0,70	Reliabel
Kualitas penyajian laporan keuangan (Y)	0,907	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil output SPSS 24

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian telah lulus uji realibilitas karena *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,7$. Dengan demikian dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliable*.

2.3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan jika menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas



Sumber: Hasil output SPSS 24

Gambar 4.4. Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.4 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data memenuhi unsur normalitas. Sedangkan pada uji kolmogorof smirnof dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini.

Tabel 4.15
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3	Y
N		50	50	50	50
Normal	Mean	3.8220	3.6540	3.7340	3.8240
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.54184	.46783	.50370	.54607
Most Extreme	Absolute	.111	.102	.115	.110
Differences	Positive	.055	.102	.094	.073
	Negative	-.111	-.074	-.115	-.110
Test Statistic		.111	.102	.115	.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170 ^c	.200 ^{c,d}	.095 ^c	.178 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil output SPSS 24

Tabel 4.11 dari hasil uji kolmogorov smirnov test dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Pemanfaatan SAP (X3) dan Kualitas penyajian laporan keuangan (Y) dengan nilai signifikan $< 0,05$ sehingga dinyatakan data terdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel–variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel–variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Adapun uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16
Uji Multikolinearitas Terhadap Kualitas penyajian laporan keuangan

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X1)	0,053	8,995
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,122	8,201
Pemanfaatan SAP (X3)	0,073	3,748

Sumber : Hasil Output SPSS 2024

Hasil penelitian diperoleh nilai *tolerance* masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance inflation faktor* (VIF) kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar sesama variabel bebas dalam penelitian ini.

3.3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.17
Uji Koefisien Korelasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-.135	.049	
X1	.688	.049	.683
X2	.068	.037	.058
X3	.289	.045	.267

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, maka persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah Y (Penyajian kualitas laporan keuangan) = $-0,135 + 0,688$ (penerapan sistem akuntansi pemerintah) + $0,058$ (sistem pengendalian internal) + $0,289$ (pemanfaatan SAP) + e .

- a. Nilai konstanta kualitas penyajian laporan keuangan sebesar $-0,135$ artinya jika variabel kualitas penyajian laporan berubah 1% sedangkan penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan pemanfaatan SAP (X_3) tetap, maka besarnya penyajian laporan keuangan (Y) sebesar $-0,135$.
- b. Nilai konstanta penerapan sistem akuntansi pemerintah sebesar $0,688$ artinya jika variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1) berubah 1% sedangkan sistem pengendalian internal (X_2) dan pemanfaatan SAP (X_3) tetap tetap, maka besarnya penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar $0,688$.
- c. Nilai konstanta sistem pengendalian internal sebesar $0,058$ artinya jika variabel sistem pengendalian internal (X_2) berubah 1% sedangkan penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1) dan pemanfaatan SAP (X_3) tetap tetap, maka besarnya sistem pengendalian internal (X_2) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar $0,058$.
- d. Nilai konstanta pemanfaatan SAP sebesar $0,289$ artinya jika variabel pemanfaatan SAP (X_3) berubah 1% sedangkan penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1) dan sistem pengendalian internal (X_2) tetap,

maka besarnya penerapan pemanfaatan SAP (X_3) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,289.

4.3. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 4.18
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-2.725	.009
X1	14.110	.000
X2	1.836	.043
X3	6.478	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil olahan data statistik uji regresi berganda (lihat Tabel 4.15), maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1) diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.
- 2) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan

keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui variabel sistem pengendalian internal (X_2) diperoleh nilai signifikansi $0,043 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima.

3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pemanfaatan SAP mempunyai pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui variabel pemanfaatan SAP (X_3) diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian hipotesis kedua (H_3) diterima.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4.19
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.528	3	4.843	2688.510	.000 ^b
Residual	.083	46	.002		
Total	14.611	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

Hasil perhitungan diperoleh f_{hitung} sebesar 2688.510 sedangkan derajat kebebasan pertama (df_1) = 3 dan derajat kebebasan kedua (df_2) = 46, sehingga diperoleh f_{tabel} = 2.806845. Dari hasil tersebut (f_{hitung}

= 2688.510) < (2.806845) sehingga terletak pada daerah penerimaan hipotesis, maka artinya ada pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan pemanfaatan SAP (X_3) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Kabupaten Jayapura.

3) Koefisien Determinasi

Tabel 4.20
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.994	.994	.04244

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

b. Dependent Variable: Y

Besarnya nilai determinasi (R^2) (lihat Tabel 4.17) hasil hitung adjusted R square adalah sebesar 0,970. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel penerapansistem akuntansi pemerintah (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan pemanfaaatn SAP (X_3) mempunyai kontribusi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sebesar 99,7% dimana sisanya yaitu sebesar 0,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

Hasil penelitian diperoleh penerapan sistem akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas penyajianlaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Nilai koefisien korelasi diperoleh bahwa

penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,688.

Penyajian data dalam laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat menjadi kunci dalam mencerminkan kinerja dan posisi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, ditemukan bahwa penerapan berbasis akrual, berbasis kas, dan penyajian yang wajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pentingnya menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selain itu, penelitian juga menyoroti peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. SAP membantu pemerintah sebagai steward dalam menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Penggunaan standar akuntansi pemerintah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Ikyarti & Aprila, 2019). Dalam konteks daerah, penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara baik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan memastikan bahwa SDM yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi dan keuangan (Pujanira & Taman, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah, dkk (2019); serta oleh Suprihatin dan Ananthi (2019) dan (Wibowo, 2022). menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dorongan bagi pemerintah dan organisasi untuk lebih memperhatikan pentingnya menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik dan memastikan SDM yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adopsi standar akuntansi pemerintah yang tepat, laporan keuangan pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengguna, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan teori keagenan (*Agency Theory*) penerapan sistem akuntansi dapat dilakukan dengan adanya laporan pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, principal dapat menilai kinerja manajemen, maka diperlukan monitoring yang hanya dapat

dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Auditor Independen untuk dapat melakukan kegiatan auditing.

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

Hasil penelitian diperoleh sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan nilai koefisien korelasi besarnya sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,058.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faishol (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara.

Nilai rata-rata sistem pengendalian internal di kategorikan baik. Jika dilihat dari nilai rata - rata capaian responden bahwa lingkungan pengendali diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, lingkungan pengendali diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko melalui analisis risiko serta pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal melalui pemantauan berkelanjutan. Dengan demikian bila temuan salah saji lolos dari pengujian secara kuantitatif, artinya salah saji masih dibawah threshold, maka auditor perlu melakukan pengujian lagi dari sudut pandang kualitatif. Dalam tahap ini auditor perlu mengidentifikasi kepentingan atau concern dari pengguna laporan keuangan hasil auditannya.

Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Dalam teori keagenan sistem pengendalian auditor yang berasal dari pihak eksternal yang independen diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif untuk dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan yang terjadi didalam pemerintahan. Kemudian

diharapkan dapat melakukan audit dengan menghasilkan opini audit yang sesuai dengan kondisi lapangan serta mengurangi biaya yang dikeluarkan akibat adanya benturan kepentingan tersebut.

3. Pengaruh pemanfaatan SAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

Hasil penelitian diperoleh pemanfaatan SAP mempunyai pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan nilai koefisien korelasi semakin baik penerapan pemanfaatan SAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan akan meningkat penyajian kualitas laporan keuangan.

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura telah memanfaatkan teknologi informasi dengan cukup baik terutama dalam penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sistem SIMAKDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah). Pemanfaatan teknologi informasi yang cukup baik dilakukan oleh Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten dengan memasang jaringan internet yang dapat dimanfaatkan disetiap unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.

Guna menaikkan akuntabilitas keuangan serta kinerja pemerintah daerah, diperlukan suatu Teknologi yang memadai yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi guna mendukung terciptanya Pemerintahan yang *good governance*. Hal ini didukung dengan hasil dari penelitian Chodijah & Hidayah (2018) dengan hasil yang menunjukkan

bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian lainnya dengan hasil yang serupa juga dilakukan oleh (Imelia, 2021).

Pemerintah pusat maupun daerah harus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang maju agar kemampuan dalam pengelolaan keuangan meningkat, serta dapat kepada pelayanan publik tentang Informasi Keuangan. Kesempatan semua orang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara tepat dan akurat dapat dilakukan jika teknologi informasi berpotensi dengan pesat dimanfaatkan secara luas.

Dalam teori keagenan pemanfaatan SAP dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dipercaya (*reliabel*) Maka dengan adanya teori keagenan ini, dapat membantu auditor dalam memahami konflik kepentingan yang terjadi antara agent dan principal yang berujung pada tindakan kecurangan (Rafika, 2020).

Hasil penelitan diperoleh adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan pemanfaatan SAP (X_3) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Hasil hitung adjusted R square adalah sebesar 0,970. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan pemanfaaaatn SAP (X_3) mempunyai kontribusi terhadap

kualitas penyajian laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sebesar 99,7% dimana sisanya yaitu sebesar 0,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.